

RENCANA KERJA

DPPKUM.2024

DINAS PERINDAGKOP UKM

2024
2024



DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan evaluasi dan telaahan terhadap Rencana Kerja tahun sebelumnya, isu-isu penting/strategis terkini dan usulan kegiatan dari masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 untuk menjawab atau meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan di Bidang Industri Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 kami susun, semoga dapat menjadi pedoman dalam melakukan Kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2024.

Pangkalan Bun, 5 Juli 2023

Kepala Dinas Perindagkop UKM
Kabupaten Kotawaringin Barat



Handwritten signature in blue ink.

ALFAN KHUSNAINI, S.T. M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 197412192003121005

D A F T A R I S I

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023	5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V PENUTUP	49
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berbeda dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memiliki Visi dan Misi yang merupakan mandat politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun perencanaan. RPD yang disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Meskipun tidak memiliki Visi dan Misi untuk diacu sebagai cita-cita pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat, namun dijelaskan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mana dalam ketentuan umum penyusunan RPD disusun memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2025 sebagai jaminan bahwa tujuan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RPD tahun 2023- 2026 terintegrasi dan sekaligus menjamin ketercapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut :

Tujuan I : "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial Dan Ekonomi Kreatif"

Tujuan II : "Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan"

Tujuan III : "Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman Dan Demokratis"

Tujuan IV "Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif"

Tujuan V "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia"

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dengan Adanya Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi landasan dan pedoman dalam beberapa aspek diantaranya :

1. Agar perencanaan kegiatan dan program lebih terarah dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Menjabarkan rencana kerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3. Sebagai acuan bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan capaian Renstra SKPD
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang didukung dengan Perbup No. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2022 merupakan periode akhir Renstra 2017- 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Renstra PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Target (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	90	90	90	95	95	95
Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Prosentase ketercukupan sarana dan prasarana apratur	85	85	90	90	95	95
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	8	10	12	14	16	18
Meningkatnya Nilai Tambah hasil produksi IKM	Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM	6	8	10	12	14	16
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	5	5	6	7	9	10
Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolgian	Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	11,06	12,11	13,16	72	75	80

Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat	Persentase pengelolaan teknis pasar rakyat yang ditingkatkan	5,00	10,00	19,00	29,00	38,00	48,00
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	2,41	2,49	2,60	2,73	2,85	3,11
Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro	Persentase UKM terhadap UMKM	1,21	1,23	1,25	1,27	1,29	1,31

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2022). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022.

Berikut ini Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel. 2.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam Dokumen RENSTRA.

Pengukuran kinerja berisi indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	95,00	95,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80)	B (72)	87,50	Tinggi
3	Meningkatnya Produktifitas Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM	16,00	9,48	59,125	Rendah
4	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%	8,00	7,66	100,00	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	10,00	35,10	351,00	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolgian	Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	80,00	88,68	110,85	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat	Persentase Pasar dalam kondisi baik	48,00	59,09	123,10	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	10,00	9,28	92,80	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	3,11	2,96	95,18	Sangat Tinggi
10	Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro	Persentase UKM terhadap UMKM	1,31	1,02	77,86	Tinggi

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

1 Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (SATU) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja 1: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	95	95	100

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	90	91	92	93	94	95	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop UKM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	90	91	92	93	94	95	90	91	92	93	94	95

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat "**Tercapai**".

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan operasional kedinasan serta memprioritaskan kegiatan kegiatan inti yang berdampak terhadap pencapaian Kinerja Dinas.
2. Pengelolaan Kepegawaian dan dukungan kelengkapan dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 1 dapat tercapai sesuai kinerja yang diharapkan, meskipun demikian perlu terus ditingkatkan mengingat tantangan dalam penunjang pembangunan sektor Industri, Perdagangan dan Koperasi membutuhkan langkah cepat dalam merespon setiap permasalahan yang akan dihadapi, Adapun strategi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

2 Sasaran: Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (SATU) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

➤ Indikator Kinerja 1: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81	*72	87,50

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	70	81	81	81	81	100	100	80	80	72	*80

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop UKM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	70	81	81	81	81	70	70	70	76	72	*76

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat "**Belum Tercapai**".

Adapun analisis penyebab belum tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman sub komponen dan data dukung kinerja yang dibutuhkan dalam penilaian SAKIP.
2. Belum membuat Manajemen Resiko sampai dengan lepel Operasional.
3. Masih rendahnya kesadaran dan disiplin Pegawai dalam penyampaian progress kinerja dan data dukung kinerja, sehingga progress evaluasi kinerja sulit dilakukan.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Aplikasi esakip untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan serta memonitor progres kinerja pegawai.
2. Melakukan menyusun manajemen resiko sampai dengan lepel operasional untuk meminimalisir kendala dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
3. Telah mengagendakan kegiatan rapat pimpinan secara rutin (setiap senin pagi) untuk membahas permasalahan dan penyiapan suatu kegiatan secara lebih terperinci.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 2 ini belum tercapai kinerjanya dan memerlukan langkah langkah strategis sebagaimana rumusan solusi yang akan dilaksanakan untuk perbaikan kedepan.

3 Sasaran: Meningkatkan Nilai Tambah hasil produksi Industri Kecil dan Menengah

Keberhasilan sasaran strategis 3 (tiga) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja 1: Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor Industri Kecil Menengah

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor Industri Kecil Menengah	%	16,00	9,48	59,125

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM	8,1	32,82	35,35	-12,99	8,76	9,46	134,96	410,21	353,5	-108,25	62,57	59,125

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop UKM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan
Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	8,1	32,82	35,35	- 12,99	8,76	9,48

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat “**Belum Tercapai**”.

Adapun analisis penyebab belum tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian tarif harga BBM berdampak pada tingginya angka inflasi di daerah sehingga daya beli masyarakat menurun.
2. Biaya produksi menjadi lebih tinggi, seiring kenaikan harga bahan baku produksi sektor industry olahan pangan.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program perencanaan dan pembangunan industri
 - 1.1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
2. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
 - 2.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
 - 3.1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Berupaya menekan biaya produksi saat terjadinya inflasi melalui program pengendalian inflasi yang focus di sektor Industri Kecil dan Menengah dengan pendistribusian bantuan bahan baku kepada 591 pelaku IKM olahan pangan
2. Memberikan bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan produktifitas pelaku industry kecil menengah.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 3 ini belum tercapai kinerjanya dan memerlukan langkah langkah strategis sebagaimana rumusan solusi yang telah dan akan dilaksanakan untuk perbaikan kedepan, meskipun demikian ditengah tantangan ekonomi nasional yang dirasa cukup berat pertumbuhan 9,48 % sektor industri kecil menengah patut disyukuri mengingat gejolak perekonomian nasional maupun perekonomian dunia yang belum stabil sepenuhnya.

4 Sasaran: Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting

Keberhasilan sasaran strategis 4 (empat) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja 1: Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%	%	8	7,66	100

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%	< 9	< 9	< 9	5,07	5,62	7,66	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop UKM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%	< 9	< 9	< 9	< 9	8,5	8	< 9	< 9	< 9	5,07	5,62	7,66

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat **"Tercapai"**.

Adapun analisis pendukung tercapainya kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya intervensi program pemerintah secara nasional, ini ditunjukkan dengan terjaganya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sepanjang tahun 2022 rata-rata dibawah 9 persen
2. Meskipun sempat terjadi inflasi yang cukup tinggi hingga 8,12% akibat dari kebijakan penyesuaian tariff BBM, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bersama sama menekan laju inflasi dengan cepat melakukan Operasi Pasar sehingga harga harga kebutuhan barang pokok kembali dapat di kendalikan.
3. Pemantauan Informasi harga barang pokok dan penting (Bapokting) dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi dilapangan secara actual dan segera menginformasikan hasil pemantauan kepada masyarakat luas melalui website system informasi Bapokting Kobar.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
 - 1.1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

2. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
 - 2.1. Penerbitan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - 2.2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 4 ini telah tercapai, meskipun demikian Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting harus tetap menjadi perhatian bersama mengingat sempat terjadi inflasi yang cukup tinggi hingga 8,12% akibat dari kebijakan penyesuaian tariff BBM, interpersi program pemerintah secara nasional telah dilaksanakan dengan baik sehingga harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sepanjang tahun 2022 rata-rata dibawah 9 persen.

5 Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor

Keberhasilan sasaran strategis 5 (empat) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja 1: Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	%	10	35,10	351,00

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	124	17,09	29,53	15,63	61,88	35,1	2480	198,4	234,33	223,29	687,56	351,00

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop UKM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	5,00	5,00	6,00	7,00	9,00	10,00	124	17,09	29,53	15,63	61,88	35,1

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat "**Tercapai**".

Adapun analisis pendukung tercapainya kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Permintaan akan bahan baku (CPO) dari luar negeri cenderung stabil pasca pandemi covid-19
2. Adanya insentif pembebasan pungutan ekspor CPO
3. Semakin mudahnya mengurus perizinan usaha melalui OSS sehingga memudahkan dan mempercepat roda perekonomian daerah.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan ekspor
 - 1.1. Penerbitan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Pameran Dagang Lokal
 - 1.1.2. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 5 ini telah tercapai dengan sangat baik, berdasarkan Data Realisasi Ekspor sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar (US\$) 913,70 jt tumbuh 35,10% dibandingkan dengan Realisasi Ekspor tahun 2021 sebesar (US\$) 689,63 jt, dapat dinilai sangat baik, ini disebabkan permintaan akan bahan baku dari luar negeri cenderung stabil pasca pandemi covid-19, sejalan dengan berlanjutnya insentif pembebasan pungutan ekspor CPO serta didukung kegiatan kegiatan penunjang seperti pelaksanaan Pameran dan pelatihan ekspor bagi pelaku UKM potensial turut mendukung pencapaian pada sasaran ini.

6 Sasaran: Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolgian

Keberhasilan sasaran strategis 6 (enam) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja 1: Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	%	80	88,86	110,88

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	11,05	19,19	38,36	27,24	100	88,68	100	158,45	291,44	37,83	133,33	110,85

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop UKM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	11,05	12,11	13,16	72,00	75,00	80,00	11,05	19,19	38,36	27,24	100	35,1

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat "**Tercapai**".

Adapun analisis pendukung tercapainya kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah yang kuat untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

2. Meskipun SDM tenaga Penera dinilai sangat terbatas mengingat potensi peralatan UTTP cukup besar, namun dengan Kelengkapan Peralatan dan dukungan anggaran yang cukup sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
 - 1.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - 1.1.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - 1.1.2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 6 ini telah tercapai dengan sangat baik, Pelaksanaan Sidang Tera Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pada tahun 2022 Terealisasi 1419 Unit dari target 1280 unit UTTP atau sebesar 110,88%, meskipun realisasi melebihi target yang telah ditetapkan namun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelayanan tera tera ulang kepada dunia usaha perdagangan, yakni terbatasnya jumlah SDM Tenaga Berhak (Penera) dan tenaga Reparatur dalam mendukung pelaksanaan tera/tera ulang UTTP, serta tantangan eksternal yang menjadi kendala yakni kurangnya kesadaran pemilik UTTP/pedagang untuk melakukan tera/tera ulang timbangan yang digunakan.

7 Sasaran: Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat

Keberhasilan sasaran strategis 7 (tujuh) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja 1: Persentase Pasar dalam kondisi baik

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pasar dalam kondisi baik	%	48	59,09	131,31

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pasar dalam kondisi baik	5	10	27	54,55	54,55	59,09	100	100	142,11	188,10	143,55	123,10

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop UKM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pasar dalam kondisi baik	5	10	19	29,00	38,00	48,00	5	10	27	54,55	54,55	59,09

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat "**Tercapai**".

Adapun analisis pendukung tercapainya kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah yang kuat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan masyarakat akan kebutuhan sarana perdagangan seperti pasar rakyat/ Pasar tradisional.

2. Tata kelola pasar rakyat yang semakin baik sehingga memudahkan dan meningkatkan citra pasar rakyat untuk dapat tetap bersaing dengan pasar modern/ swalayan.
3. Ketertiban dan kebersihan pasar rakyat dapat terjaga berkat pengelolaan dan dukungan anggaran yang memadai.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
 - 1.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 1.2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 7 ini telah tercapai dengan cukup baik, Peningkatan tata kelola Pasar Rakyat (pasar tradisional) Pada Tahun 2022 dinilai cukup baik ditengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, hal ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana proses pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat demi terwujudnya efektivitas sarana distribusi barang dan jasa masih menjadi prioritas pemerintah, terdapat 6 pasar/block pasar yang telah ditingkatkan, baik peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat, maupun pemeliharanya, meski demikian pengelolaan sarana perdagangan seperti halnya pasar rakyat / pasar tradisional harus terus ditingkatkan utamanya dukungan infrastruktur penunjang kelancaran akses keluar masuk pasar dan pemeliharaan secara berkala yang membutuhkan anggaran yang cukup untuk menunjang perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

8 Sasaran: Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

Keberhasilan sasaran strategis 8 (delapan) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja 1: Persentase Koperasi Berkualitas

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Koperasi Berkualitas	%	10	9,28	92,90

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi Berkualitas	5	7	8	4,87	5,06	9,28	100	116,67	114,29	60,88	56,22	92,80

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop UKM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi Berkualitas	5	6	7	8	9	10	5	7	8	4,87	5,06	9,28

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat "**Belum Tercapai**" meskipun dalam kategori Capaian Sangat Tinggi.

Adapun analisis pendukung tercapainya kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan kelembagaan, pelatihan dan pendampingan perkoperasian yang terus dilakukan demi terwujudnya koperasi yang berkualitas dan mandiri.
2. Penilaian kesehatan koperasi sangat membantu koperasi dalam mengetahui kekurangan dan kelebihan unit usahanya.
3. Adanya Anggaran yang cukup yakni sumber dana DAK non Fisik dalam mendukung Pengembangan Koperasi dan UKM sehingga pembinaan dan pelatihan koperasi dapat dilaksanakan.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 - 1.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
 - 2.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/KotaProgram pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 - 2.2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro
3. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
 - 3.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 8 ini telah tercapai dengan cukup baik, Upaya peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dengan indikator meningkatnya kualitas koperasi pada tahun 2022 dengan target 10% atau sebanyak 23 Koperasi yang berkategori berkualitas dari 237 unit Koperasi dapat terealisasi sebanyak 22 Koperasi (9,28%) dari 47 Koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2022, hal ini dinilai cukup baik mengingat beberapa koperasi produsen melakukan replanting atau peremajaan kelapa sawit hingga berdampak pada penurunan volume usaha koperasi produsen sektor perkebunan. Pembinaan dan pemberdayaan koperasi harus terus tingkatkan, baik melalui pengawasan kelembagaan,

pelatihan dan pendampingan perkoperasian sehingga dapat mengatasi masalah klasik koperasi yakni rendahnya pemahaman, mekanisme kerja dan manajemen koperasi sehingga menjadi koperasi yang mandiri dan memberikan dampak positif bagi seluruh anggota koperasi dan masyarakat.

9 Sasaran: Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif

Keberhasilan sasaran strategis 9 (sembilan) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

➤ Indikator Kinerja 1: Persentase Wirausaha Baru

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Wirausaha Baru	%	3,11	2,96	95,38

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Wirausaha Baru	2,36	2,17	2,45	36,88	2,17	2,96	98,03	87,18	94,33	135,092	76,41	95,18

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop UKM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra	Realisasi Kinerja sd Tahun 2022
-------------------	------------------------	---------------------------------

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Wirausaha Baru	2,41	2,49	2,6	2,73	2,84	3,11	2,36	2,17	2,45	36,88	2,17	2,96

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat “**Belum Tercapai**” meskipun dalam kategori Capaian Sangat Tinggi.

Adapun analisis pendukung tercapainya kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan dan pelatihan yang terus dilaksanakan.
2. Adanya kebijakan kemudahan proses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui aplikasi Online Single Submission (OSS)
3. Adanya Anggaran yang cukup yakni sumber dana DAK non Fisik dalam mendukung Pengembangan Koperasi dan UKM sehingga pembinaan dan pelatihan UMKM dapat dilaksanakan.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
 - 1.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 8 ini telah tercapai dengan cukup baik, Pencapaian Persentase Wirausaha Baru pada tahun 2022 dengan target 3,11% dari 27.904 unit usaha mikro (Data Sensus Ekonomi 2016) atau 867 WUB dapat terealisasi 827 WUB atau sebesar 2,96% dengan capaian 95,38% dari target yang telah di tentukan, disamping pendampingan dan pelatihan yang terus dilaksanakan, adanya kebijakan kemudahan proses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta insentif pemberian hibah bantuan peralatan usaha kepada pelaku UMK oleh pemerintah turut mendukung tercapainya target dalam Penumbuhan Wirausaha Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat.

10 Sasaran: Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro

Keberhasilan sasaran strategis 10 (sepuluh) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja 1: Persentase UKM terhadap UMKM

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase UKM terhadap UMKM	%	1,31	1,02	77,86

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase UKM terhadap UMKM	1,17	1,17	1,80	2,73	0,88	1,02	96,69	95,12	144	214,96	68,22	77,86

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop UKM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase UKM terhadap UMKM Baru	2,41	2,49	2,6	2,73	2,84	3,11	1,17	1,17	1,80	2,73	0,88	1,02

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat "**Belum Tercapai**"

Adapun analisis penyebab belum tercapainya kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian tarif harga BBM berdampak pada tingginya angka inflasi di daerah sehingga daya beli masyarakat menurun yang berdampak juga kepada penurunan omset pelaku UKM.
2. Biaya produksi menjadi lebih tinggi, seiring kenaikan harga bahan baku sektor UKM.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan usaha mikro kecil menengah
 - 1.1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Berupaya menekan biaya produksi saat terjadinya inflasi melalui program pengendalian inflasi yang focus di sektor UKM dengan memberikan bantuan peralatan dan kelengkapan usaha.
2. Melakukan pendampingan dan fasilitasi temu usaha antara usaha mikro dan usaha menengah dan usaha besar.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 10 ini telah tercapai dengan cukup baik, Capaian ini dinilai cukup baik karena jika dilihat lebih dalam tingkatan UMKM yang ada di wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat sangat didominasi oleh usaha mikro dimana usaha mikro di Kabupaten Kotawaringin Barat masih mendominasi sebesar 98,87% atau sebanyak 27.904 unit usaha, yang menurut perundang-undangan memiliki omset dalam satu tahun sampai dengan dari 300 juta rupiah atau nilai asset/modal usaha sampai dengan 50 juta rupiah.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi;
- c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan permasalahan internal maupun external berkaitan dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat dapat di rekomendasikan Isu Strategis sebagai berikut:

- a) Peningkatan Daya Saing Industri melalui penguatan struktur industri (hulu-antara-hilir), optimalisasi penerapan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri, penguatan sistem informasi dan data industri,
- b) Pengembangan Industri Kecil Menengah perlu didasarkan pada Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- c) Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga.

- d) Optimalisasi standarisasi mutu barang melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi serta peningkatan pengembangan mutu barang.
- e) Peningkatan SDM Pelaku Koperasi lebih dititik beratkan kepada Pelatihan dan Bimbingan teknis manajemen usaha dan pertanggungjawaban keuangan koperasi sehingga diharapkan pertumbuhan jumlah koperasi yang mampu melaksanakan RAT dapat tumbuh menjadi koperasi yang mandiri dan berdaya saing.
- f) Penumbuhan jiwa wirausahawan bagi pelaku Usaha Mikro harus terus digalakan dan ditingkatkan sebagai dukungan pencapaian program nasional yakni Program Pengembangan Kewirausahaan sehingga berdampak langsung kepada masyarakat serta mendorong penyerapan tenaga kerja.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SOPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SOPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SOPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SOPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPD, terdapat gap/kesenjangan antara target yang harus dicapai pada Renja SKPD 2024 dengan target dalam Dokumen Renstra SOPD 2024-2026. Hal ini disebabkan dari pagu indikatif yang sudah disediakan untuk SOPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk Tahun 2024 masih belum sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target sesuai periode Renstra 2023-2026.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan SKPD bisa diusulkan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan bisa diusulkan SKPD kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui forum SKPD maupun forum lainnya sebelum penyusunan rencana kerja.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 sebagian merupakan usulan dari masyarakat yang disampaikan kepada SKPD dengan melihat prioritas, urgensitas dan permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran utama SKPD..

Tahun 2024 usulan dari masyarakat melalui Kelurahan/Kecamatan maupun sellai Pokok-Pokok Pikiran DPDR Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait dengan bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di akomodir melalui aplikasi SIPD-RI Kemendagri.

Pada penyusunan Renja tahun 2024 terdapat 6 usulan dari masyarakat yang kemudian setelah dilakukan Koordinas, verifikasi bahwa usulan tersebut dapat di setujui sebagai berikut :

No	Usulan	Alamat	Desa/Kel	Koefisien
1	Peralatan mesin press batako dan paving	Desa Tanjung Terantang	Arut Selatan	1 Paket
2	Mesin Pengolahan Limbah Kayu	RT 10 Desa Sei. Kapitan	Kumai	1 Paket
3	Peralatan/perlengkapan pembuatan makanan ringan/cemilan"	UMKM UP2K Melawen Sejahtera	Pangkalan Lada	1 Paket
4	Bantuan Tenda Lipat	Karang Taruna "Maju Bersama" Desa Tanjung Terantang	Arut Selatan	1 Paket
5	Bantuan Tenda Lipat	Pelaku usaha UMKM dilapangan Desa Bumi Harjo,	Kumai	1 Paket
6	Bantuan Tenda Lipat	Desa Karang Mulya	P. Banteng	1 Paket

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Analisis renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra PD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD.

Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya.

A. Prioritas Nasional

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat selaras dengan visi pembangunan nasional yakni **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan masing-masing kementerian yang menangani urusan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI telah menyusun Rencana Strategis 2020 – 2024 yang mengacu pada RPJMN tahun 2020 – 2024. Visi Pembangunan Perdagangan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan RI pada tahun 2020 – 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020

Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 adalah : “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja dijabarkan pada 7 sasaran strategis Kementerian Perdagangan.

Sektor perdagangan berperan dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain.

Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB, dan penciptaan lapangan kerja secara luas.

Hal ini terjadi karena terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas *mutual partnership* dan *linkage* antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya tingkat penerapan

manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produktif. Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena sinergi antar wilayah. Faktor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.

Demikian juga halnya dengan sektor perindustrian, sebagai salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Perindustrian sebagai kementerian yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dengan **Misi** :

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional" yang dijabarkan pada 13 sasaran strategis. Sasaran strategis Kementerian Perindustrian RI ini merupakan pendorong bagi pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusi industri pengolahan menjadi salah satu pendorong bagi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerja sektor industri lima tahun kedepan.

B. Prioritas Provinsi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2025, terdapat program prioritas yang sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah yaitu :

Dibidang Perdagangan dan perindustrian yaitu pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan dengan beberapa fokus sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan & perkembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu pada sumber daya lokal yang berkelanjutan
2. Meningkatnya kualitas perdagangan di Kalimantan Tengah
3. Meningkatnya Nilai Ekspor non migas
4. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri perdagangan luar negeri Kalimantan tengah
5. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Adapaun kebijakan dan sasaran diibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu fokus terus mendorong Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku Koperasi dan Usaha Mikro serta Penguatan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro.

1. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang berasal dari Koperasi dan UMKM
2. Meningkatnya Jumlah, Skala dan Kapasitas Usaha KUMKM
Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari pelaku UMKM
4. Asd Pertambahan Jumlah Pendapatan pelaku Usaha UMKM
5. Terwujudnya tatakelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional, kredibel dan akuntabel
6. Terwujudnya Wirausaha dari pelaku wira usaha yang tangguh dan mandiri

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2023-2026.

pada logframe perencanaan terintegratif untuk pencapaian misi 1 dalam RPD 2023-2026, dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berada pada posisi tugas untuk "Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan"

Adapun rumusan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Industri Potensial Daerah
2. Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan
3. Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel

Dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang didalamnya telah mempertimbangkan kendala dan permasalahan serta peluang dan kelebihan perekonomian sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka fokus sasaran dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026, Berikut merupakan Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk Industri Kecil menengah (IKM)
2. Meningkatnya iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor
3. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan kewirausahaan UMKM
4. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah

Sasaran-Sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan tersebut adalah usaha-usaha yang akan ditempuh dan diperjuangkan sebagai jalan untuk tercapainya 3 tujuan besar yang dicita-citakan.

Keterkaitan tujuan dan sasaran sangat penting dalam membangun alur dan pola pikir dalam pelaksanaan pembangunan melalui program dan kegiatan di tengah masyarakat nantinya, sehingga menjadi sangat penting dalam memahami keterkaitan tujuan dan sasaran sehingga strategi maupun kebijakan yang akan diambil dapat tepat sasaran dengan efektif dan efisien dalam penggunaan resource yang ada, untuk dapat memahami secara mudah dan gamblang sebagaimana telah tergambar dalam *tabel tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang ada dibawah.

Dengan sasaran-sasaran utama yang telah diketahui maka Dinas Perindagkop UMK juga telah menetapkan ukuran penilaian atau Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing masing tiap sasaran untuk mengetahui

sejauh mana perkembangan dari sebuah kebijakan yang telah diputuskan, baik dari sisi keberhasilan maupun kegagalan dalam proses evaluasi atas target capaian di kemudian hari

Adapun Tujuan, Sasaran dan ukuran keberhasilan serta penjelasan pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Industri Potensial Daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah (ADHK))
2. Meningkatnya produktifitas IKM. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Persentase Peningkatan Nilai tambah Industri Kecil Menengah

Sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Dinas Perindagkop UKM adalah melakukan Pembinaan dan bertanggung jawab secara langsung dalam memajukan perekonomian sektor Industri khususnya Industri Kecil dan Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemilihan Indikator Kinerja pada Sasaran I yaitu Meningkatnya produktifitas Industri Kecil dan Menengah dapat tergambar dari peningkatan Nilai tambah hasil produksi pada tahun berkenana (tahun N) dibandingkan dengan Nilai tambah Hasil produksi tahun sebelumnya (N-1) sehingga dapat di peroleh gambaran kinerja atas suatu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan akan di laksanakan dikemudian hari.

3. Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan, Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah (ADHK))
4. Meningkatnya Iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta

mendorong peningkatan ekspor. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- Inflasi Pangan bergejolak
- Tertib Usaha
- Persentase Pertumbuhan nilai ekspor
- Persentase Koperasi berkualitas
- Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha

Sasaran Ke 4 yaitu Meningkatnya Iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor yakni keterlibatan Peran pada sektor perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengeluaran pada sektor publik, mengingat kemampuan fiskal pemerintah daerah yang sangat terbatas. Untuk itu diperlukan peran serta pihak swasta dalam melakukan penanaman modal. Investasi merupakan salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

4.1. Inflasi Pangan bergejolak,

Pentingnya Kestabilan Harga melalui pengendalian Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Stabilisasi Harga Pangan yang merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menjaga tingkat Inflasi suatu daerah tetap aman, di mana barang – barang pokok dan barang penting tersebut akan mempengaruhi tingkat pengeluaran masarakat, adapun Indikator Kinerja yang di gunakan adalah "Inflasi Pangan bergejolak" tahun sebelumnya (N-1) sebagaimana yang termasuk barang kebutuhan pokok diantaranya seperti beras, gula, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, daging sapi, susu dan lain sebagainya.

Selain menjaga ketersediaan barang dan menjaga kelancaran arus distribusi barang tidak kalah pentingnya pengelolaan Pasar rakyat atau yang biasa disebut dengan pasar tradisional dalam pengembangan perekonomian maupun dalam rangka kestabilan perekonomian di suatu daerah tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasar merupakan pusat perekonomian rakyat dimana selain penyedia barang jasa mendistribusikan hasil produksinya disisi lain konsumen dan masyarakat membutuhkan barang / jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, dalam arti yang lebih penting lagi pasar dapat disebut sebagai urat nadi perekonomian rakyat sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian para stakeholder terkait untuk terus meningkatkan dan mempertahankan eksistensi pasar rakyat atau pasar tradisional di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.2. Tertib Usaha

Dalam rangka penciptaan ekonomi daerah yang sehat yang berkelanjutan, maka dibutuhkan kesadaran berniaga dengan menaati peraturan perundangan sehingga sinergi pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat berjalan baik, dalam hal ini Tertib Usaha adalah semua kegiatan usaha telah memiliki izin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan/atau jasa yang dilarang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta yang tidak kalah penting urusan standarisasi dan dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada akhirnya adalah terwujudnya standarisasi alat ukur dan berdampak pada kepuasan konsumen maupun masyarakat yang terlindungi haknya dalam bertransaksi jual beli.

4.3. Pertumbuhan nilai ekspor

Tidak terkecuali pada tingkat Nasional yang terus menekankan pentingnya realisasi ekspor, di tataran daerah juga di tuntut berperan aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan produk ekspor, hal ini sangat penting bagi daerah berkembang seperti Kabupaten Kotawaringin Barat dimana penopang pertumbuhan ekonominya masih berbasis komoditas seperti hasil perkebunan kelapa sawit baik yang di kelola perusahaan maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat, serta tentunya yang paling signifikan sumbangan nilai ekspor tersebut ialah dari hasil pengolahan berupa minyak sawit mentah atau yang bisa di sebut crude palm oil (CPO).

Dengan situasi perekonomian dunia yang di nilai belum stabil dalam bidang perdagangan luar negeri yang pasti akan berdampak pada daerah maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja pada sasaran Pertumbuhan ekspor daerah yaitu Persentase tingkat pertumbuhan Nilai ekspor daerah dengan harapan dapat terus memantau perkembangan realisasi ekspor daerah serta terus mengupayakan peningkatan dan perkembangan ekspor daerah melalui kebijakan dan strategi yang dinilai strategis.

4.4. Persentase Koperasi berkualitas

Dengan luas wilayah dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat secara alami Unit Usaha Mikro Kecil maupu menengah akan tumbuh, tidak terkecuali unit usaha yang resmi secara kelembagaanya seperti Koperasi, dengan jumlah koperasi 237 Unit dan mempertimbangkan aspek legalitas kelembagaan dan kinerja usaha dalam Perkoperasian dinilai penting untuk terus melakukan pembinaan, pengawasan dan peningkatan Koperasi menuju Koperasi yang berkualitas sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Meskipun Koperasi sangat penting dalam rangka mendukung Peningkatan ekonomi yang berbasis kerakyatan, namun tantangan dan kendala dalam memajukan usaha melalui perkoperasian masih terbilang cukup kompleks sehingga harus mejadi perhatian dan komitmen bersama.

Terkait indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan sektor Koperasi adalah koperasi yang berkualitas yaitu koperasi yang telah melakukan kewajiban tahunan berupa penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang kemudian menyampaikan bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan usaha koperasi berupa laporan keuangan dan kinerja koperasi itu sendiri, yang kemudian dapat di peroleh informasi kinerja dalam 2 aspek yaitu dari sisi peningkatan hasil usaha atau peningkatan Volume usaha maupun kesehatan keuangan koperasi, kemudian aspek ketertiban kelembagaan koperasi yang di tunjukan oleh tingkat kepuasan anggota koperasi terhadap pengurus dan pengawas koperasi, atau dari peningkatan jumlah anggota koperasi tersebut.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut sangat penting untuk dapat mendorong Koperasi untuk aktif dan lebih mandiri dan berdaya saing melalui Modernisasi Koperasi agar tetap kompetitif di tengah persaingan usaha yang terus berkembang.

4.5 Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha

Penumbuhan jiwa kewirausaha kepada para pelaku Usaha Mikro (UM) sangat penting dan strategis terutama bagi pemuda pemuda potensial yang memiliki bakat di bidang tertentu hal ini penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah memfasilitasi dan mendukung upaya-upaya terkait penciptaan lapangan pekerjaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pengelolaan dan pengembangan seta pendampingan, sehingga SDM Pelaku Usaha Mikro menjadi

kompetitif serta dapat berperan aktif dalam mendukung perekonomian daerah melalui aktifitas produktif.

5. Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
6. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Indeks Kepuasan Aparatur

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang AKIP.

Indikator dukungan bagi pencapaian nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dapat diukur melalui hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh tim Penilaian SAKIP SKPD yang di ketuai oleh Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana kebijakan daerah bahwa Nilai SAKIP perangkat daerah harus mengikuti target pencapaian Nilai SAKIP dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta target kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Indikator dan Target Tahun 2023-2026

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Angka Dasar 2021	Tahun			
				2023	2024	2025	2026
	Tujuan 1 : Optimalisasi Industri Potensial Daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah (ADHK))		4.006,69	4.194,66	4.382,63	4.579,85
1	Sasaran 1: Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Industri Kecil menengah (IKM)	Indikator Sasaran 1.1 :Persentase Nilai Tambah Industri Kecil Menengah (%)	8,09%	9,2	10,01	11,3	12,88
	Tujuan 2: Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah (ADHK))		1.879,60	1.959,85	1.980,10	1.999,90
2	Sasaran 2 : Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor	Indikator Sasaran 2.1 : Inflasi Pangan bergejolak	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
3		Indikator Sasaran 2.2 : Tertib Usaha	70	75	77	80	83
4		Indikator Sasaran 2.3 : Pertumbuhan nilai ekspor	6,3	8,5	9,8	10,8	11,9
5	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Koperasi dan kewirausahaan UMKM	Indikator Sasaran 3.1 : Persentase Koperasi berkualitas	5,06	10	12	15	20
6		Indikator Sasaran 3.2 :Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	3,33%	3,8	4	4,1	4,2
	Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indikator Tujuan 3 : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73	80,00	81,00	82,00	83,00
7	Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah	Indikator Sasaran 4.1 : Indeks Kepuasan Aparatur	70	72	73	75	80

Linearitas perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dapat dilihat pada bagan berikut :

Tabel Linearitas Tujuan Sasaran RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri	Optimalisasi Industri Potensial Daerah	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk Industri Kecil menengah (IKM)
		Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan	Meningkatnya Iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong peningkatan ekspor
			Meningkatnya Kualitas Koperasi dan kewirausahaan UMKM
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima	Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan kegiatan Pendanaan

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 terkait dengan kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan serta pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan pembagian kewenangan untuk masing-masing urusan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pemerintah Daerah 23 tahun 2014.

Dengan terbitnya Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada Renja tahun 2024 adalah program prioritas daerah yang telah tercantum didalam Renstra Dinas Perindagkop UKM Periode 2023-2026. Rencana program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Keperasi dan Usaha Kecil Menengah beserta indikator capaian kinerjanya sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2024
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/				
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan								
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.737.241.925		9.732.000.000				
2	17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.314.686.470		8.895.000.000				
2	17	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				111.694.000		60.000.000				
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	3 Dokumen	14 Dokumen	81.462.000		100 %	20.000.000
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	1 Dokumen	14 Dokumen	3.125.000		100 %	3.000.000
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	1 Dokumen	14 Dokumen	3.125.000		100 %	3.000.000

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	1 Dokumen	14 Dokumen	3.125.000		100 %	3.000.000
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	1 Dokumen	14 Dokumen	3.125.000		100 %	3.000.000
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	3 Laporan	14 Dokumen	3.292.500		100 %	3.000.000
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4 Laporan	14 Dokumen	14.439.500		100 %	25.000.000
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.501.003.624		6.316.000.000	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	50 Orang/bulan	27 Dokumen	6.395.003.624		100 %	6.200.000.000

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	400 Dokumen	27 Dokumen	44.000.000		100 %	54.000.000
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	1 Laporan	27 Dokumen	62.000.000		100 %	62.000.000
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						220.164.300			201.000.000
2	17	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	220.164.300		100 %	200.000.000
2	17	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						92.182.349			161.000.000
2	17	1	2.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	100 %	200 Dokumen	9 Dokumen	92.182.349		100 %	119.000.000
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						146.540.000			367.000.000

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	149 Stel	1 Dokumen	96.500.000		100 %	110.000.000
2	17	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	5 Orang	1 Dokumen	50.040.000		100 %	180.000.000
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						354.806.309		470.000.000	
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	1 Paket	76 Dokumen	13.101.752		100 %	19.000.000
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	47 Jenis	76 Dokumen	92.959.854		100 %	125.000.000
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	192 Unit	76 Dokumen	22.777.248		100 %	50.000.000

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	4 Jenis	76 Dokumen	75.488.455		100 %	76.000.000
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	20 OK	76 Dokumen	150.479.000		100 %	200.000.000
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						101.049.949		429.000.000	
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	11 Unit	32 Unit	78.874.968		100 %	120.000.000
2	17	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	4 Unit	32 Unit	22.174.981		100 %	30.000.000
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						655.201.719		627.000.000	
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	57 Paket	36 Dokumen	1.995.000		100 %	2.000.000

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	12 Bulan	36 Dokumen	336.277.593		100 %	365.000.000
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	12 Bulan	36 Dokumen	316.929.126		100 %	260.000.000
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						132.044.220			264.000.000
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	1 Unit	110 Unit	34.997.570		100 %	35.000.000
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	14 Unit	110 Unit	39.812.250		100 %	53.000.000
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	80 Unit	110 Unit	49.790.000		100 %	60.000.000

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	17	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	13 Unit	110 Unit	7.444.400		100 %	8.000.000
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						18.000.200		45.000.000	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						18.000.200		45.000.000	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 %	40 Unit Usaha	40 Koperasi	18.000.200		20 %	45.000.000
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						17.998.640		55.000.000	
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						17.998.640		55.000.000	
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 %	25 Unit Usaha	25 Laporan	17.998.640		30 %	55.000.000
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						68.550.194		65.000.000	
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						68.550.194		65.000.000	

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 %	60 Orang	60 Sertifikat	68.550.194	30 %	65.000.000	
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						24.999.570		50.000.000	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						24.999.570		50.000.000	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan volume Usaha Koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 %	7 Unit Usaha	7 Laporan	24.999.570	8 %	50.000.000	
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						106.000.210		222.000.000	
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						106.000.210		222.000.000	

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase jumlah usaha mikro Potensial yang bermitra	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	17,8 %	30 Dokumen	60 Laporan	9.999.900		17,8 %	32.000.000
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase jumlah usaha mikro Potensial yang bermitra	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	17,8 %	30 Unit Usaha	60 Laporan	15.000.000		17,8 %	75.000.000
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase jumlah usaha mikro Potensial yang bermitra	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	17,8 %	60 Unit Usaha	60 Laporan	16.000.250		17,8 %	60.000.000
2	17	7	2.01	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Persentase jumlah usaha mikro Potensial yang bermitra	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	17,8 %	60 Orang	60 Laporan	65.000.060		17,8 %	55.000.000
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						187.006.641		400.000.000	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						187.006.641		400.000.000	

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemudahan berusaha	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 %	2 Unit Usaha	10 Laporan	187.006.641		1 %	400.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN									
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan									
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/Smemper olehIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	Jumlah toko swalayan yg sesuai dengan perizinannya	25,71 %	20 Toko Modern	1 Laporan	9.790.000		25,71 %	30.000.000
3	30	2	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang									

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pelaku usaha yang izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/Smemper oleh IUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	25,71 %	1 Dokumen	1 Laporan	8.570.000		25,71 %	21.000.000
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						3.100.388.364		4.015.000.000	
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						119.985.764		1.200.000.000	
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 %	170 Unit	1 Laporan	119.985.764		50 %	200.000.000
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						2.980.402.600		2.815.000.000	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50 %	2 Dokumen	1 Laporan	2.955.502.600		50 %	2.750.000.000
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50 %	2 Dokumen	1 Laporan	24.900.000		50 %	65.000.000

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							290.500.000	
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						9.020.000	35.000.000	
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5,5 %	4 Laporan	2 Laporan	9.020.000	5,5 %	35.000.000
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						20.000.000	234.500.000	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5,5 %	12 Laporan	86 Terbitan	20.000.000	5,5 %	34.500.000
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.320.000	21.000.000	
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5,5 %	12 Laporan	70 Laporan	10.320.000	5,5 %	21.000.000
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						264.568.000	555.000.000	
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						264.568.000	555.000.000	

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Nilai Ekspor (US\$ juta)	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	564,241 Rupiah	5 Pelaku Usaha	5 Laporan	10.690.000		564,241 Rupi ah	35.000.000	
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Nilai Ekspor (US\$ juta)	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	564,241 Rupiah	3 Pelaku Usaha	5 Laporan	243.020.000		564,241 Rupi ah	200.000.000	
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Nilai Ekspor (US\$ juta)	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	564,241 Rupiah	15 Pelaku Usaha	5 Laporan	10.858.000		564,241 Rupi ah	120.000.000	
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						115.000.000			105.000.000	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						115.000.000			105.000.000	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	entase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	81 %	1630 Unit	2 Dokumen	105.000.000		81 %	75.000.000	

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	entase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	81 %	0 Orang	2 Dokumen	10.000.000	81 %	30.000.000	
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		145 Orang					
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						11.650.000		35.000.000	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						11.650.000		35.000.000	
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan omset UMKM yang bermitra	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	12 %	5 UMKM	5 Laporan	11.650.000	12 %	35.000.000	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						244.076.582		533.833.918	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						170.084.582		379.308.918	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						170.084.582		379.308.918	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5,38 %	30 Dokumen	210 IKM	57.630.476	5,38 %	75.000.000	

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5,38 %	20 Dokumen	210 IKM	34.495.000		5,38 %	80.000.000
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5,38 %	3 Dokumen	210 IKM	77.959.106		5,38 %	224.308.918
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						30.997.500		38.125.000	
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						30.997.500		38.125.000	
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan (yg di awasai data terakhir / kumulatif)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	27,78 %	10 Dokumen	85 Dokumen	9.997.500		27,78 %	10.000.000

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan (yg di awasai data terakhir / kumulatif)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	27,78 %	75 Dokumen	85 Dokumen	21.000.000		27,78 %	28.125.000
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						42.994.500		116.400.000	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						42.994.500		116.400.000	
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Nilai Kualitas Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50	2 Dokumen	2 Dokumen	17.995.000		50	72.000.000
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Nilai Kualitas Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	50	21 Dokumen	2 Dokumen	24.999.500		50	29.400.000
TOTAL											12.530.624.871		15.317.333.918	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 untuk menjawab atau meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan di Bidang Industri Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dicapai secara baik dan maksimal.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

Pangkalan Bun, 5 Juli 2023

Kepala Dinas Perindagkop UKM
Kabupaten Kotawaringin Barat



ALFAN KHUSNAINI, S.T. M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 197412192003121005

LAMPIRAN

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2017-2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d TW IV 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			54.282.578.857		40.695.775.436		8.991.081.449		8.694.951.104				49.390.726.540		2.269
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			50.165.099.471		38.103.938.169		8.146.199.233		7.868.814.214				45.972.752.383		1.798
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			112.485.000		90.094.500		22.022.000		21.984.000				112.078.500		730
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	12	35.940.000	12	29.907.000	2	6.504.000	2	6.466.000	100	99	14	36.373.000	117	101
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	6	12.142.500	6	10.118.750	1	3.475.000	1	3.475.000	100	100	7	13.593.750	117	112
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	6	12.142.500	6	10.118.750	1	3.475.000	1	3.475.000	100	100	7	13.593.750	117	112
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	6	12.588.000	6	10.490.000	1	3.475.000	1	3.475.000	100	100	7	13.965.000	117	111
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	6	12.588.000	6	10.490.000	1	3.475.000	1	3.475.000	100	100	7	13.965.000	117	111
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	18	3.321.000	18	2.767.500	3	968.000	3	968.000	100	100	21	3.735.500	117	112
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Triwulan)	24	23.763.000	24	16.202.500	4	650.000	4	650.000	100	100	28	16.852.500	117	71

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2017-2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d TW IV 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			36.628.677.456		29.920.046.017		6.119.952.481		5.982.839.868				35.902.885.885		98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	72	36.515.989.956	60	29.826.289.767	12	6.068.288.289	12	5.931.769.068	100	98	72	35.758.058.835	100	98
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Terverifikasi	9000	95.505.000	4.150	79.437.500	-	-	-	-	-	-	4150	79.437.500	46	83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	6	17.182.500	5	14.318.750	1	51.664.192	1	51.070.800	100	99	6	65.389.550	100	381
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.241.475.000		1.064.785.000		269.119.800		261.446.000				1.326.231.000		107
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen asuransi barang yang tersedia	8	1.211.475.000	5	1.060.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	100	100	6	1.260.000.000	75	104
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen laporan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	12	30.000.000	6	4.785.000	6	69.119.800	6	61.446.000	100	89	12	66.231.000	100	221
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			1.023.943.200		853.246.000		-		-				853.246.000		83
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	6	1.023.943.200	5	853.246.000	-	-	-	-	-	-	5	853.246.000	83	83
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.644.217.633		740.967.820		229.547.000		177.321.369				918.289.189		56
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	408	696.217.633	153	207.210.400	68	96.200.000	68	82.573.000	100	86	221	289.783.400	54	42
	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	390		234		80		80		100		314		81	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2017-2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d TW IV 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	95	948.000.000	58	533.757.420	12	133.347.000	12	94.748.369	100	71	70	628.505.789	74	66
Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.677.167.712		2.353.065.015		500.025.190		495.420.950				2.848.485.965		77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	84	88.527.960	121	74.081.684	12	15.590.034	12	15.556.000	100	100	133	89.637.684	158	101
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	504.092.850	16	420.571.599	1	93.189.096	1	93.180.000	100	100	17	513.751.599	283	102
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	156	91.845.402	56	15.300.467	195	14.998.654	19	5	100	100	251	30.295.717	161	33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	18	306.501.500	15	245.188.132	3	122.329.406	3	122.127.150	100	100	18	367.315.282	100	120
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	353	2.686.200.000	184	1.597.923.133	21	253.918.000	21	249.562.550	100	98	205	1.847.485.683	58	69
	Penyediaan makanan dan minuman rapat	1900		620		548		548		100		1168		61	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			921.397.500		270.538.000		172.937.490		171.595.500				442.133.500		48
Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	203	170.000.000	103	70.290.000	11	128.937.490	11	128.295.500	100	100	114	198.585.500	56	117
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang disediakan	105	751.397.500	61	200.248.000	3	44.000.000	3	43.300.000	100	98	64	243.548.000	61	32
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.306.293.800		2.330.476.724		658.080.272		587.033.877				2.917.510.601		68
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	210	11.625.000	175	7.676.000	57	1.995.000	57	59.500	100	3	232	7.735.500	110	67

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2024**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2017-2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d TW IV 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	72	1.471.992.000	60	1.033.882.530	12	326.625.672	12	261.176.131	100	80	72	1.295.058.661	100	88
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	416	286.460.000	240	33.795.000	39	49.790.000	39	49.790.000	100	100	279	83.585.000	67	29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	72	2.536.216.800	60	1.255.123.194	12	279.669.600	12	276.008.246	100	99	72	1.531.131.440	100	60
	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	72		60		12		12		100		72		100	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			609.442.170		480.719.093		174.515.000		171.172.650				651.891.743		530
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan	78	182.979.930	65	213.236.480	1	24.474.000	1	22.429.200	100	92	66	235.665.680	85	129
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan jasa perizinan	90	33.600.000	75	37.337.700	13	39.876.000	13	39.172.450	100	98	88	76.510.150	98	228
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	66	172.062.000	70	51.868.000	36	102.680.000	36	102.090.000	100	99	106	153.958.000	161	89
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5	220.800.240	13	178.276.913	5	7.485.000	5	7.481.000	100	100	18	185.757.913	360	84
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			460.812.500		283.830.300		49.996.340		49.966.540				333.796.840		72
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			460.812.500		283.830.300		49.996.340		49.966.540				333.796.840		72

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2017-2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d TW IV 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan/Pendampingan Koperasi	214	460.812.500	144	283.830.300	40	49.996.340	40	49.966.540	100	100	184	333.796.840	86	72
	Jumlah Laporan Pengawasan Koperasi	135		90		35		35		100		125		93	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			1.881.370.886		980.102.542		90.961.709		88.056.000				1.068.158.542		92
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.400.000.000		866.054.058		90.961.709		88.056.000				954.110.058		68
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang terbina	448	1.400.000.000	306	866.054.058	50	90.961.709	50	88.056.000	100	97	356	954.110.058	79	68
	Jumlah Peserta Lomba LTTK	240		240		0		0		-		240		100	
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			481.370.886		114.048.484	-		-					114.048.484		24
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Mikro	168	481.370.886	56	114.048.484	0	-	0	-	-	-	56	114.048.484	33	24
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			564.000.000		389.642.000		19.965.760		16.216.760				405.858.760		72
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			564.000.000		389.642.000		19.965.760		16.216.760				405.858.760		72
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di fasilitasi terkait Promosi Hasil Usaha Koperasi	15	564.000.000	9	389.642.000	0	19.965.760	0	16.216.760	-	81	9	405.858.760	60	72
	Jumlah koperasi yang mengikuti Fasilitasi Kemitraan usaha Koperasi dengan Perusahaan Besar	60		20		30		30		100		50		83	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2017-2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d TW IV 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Koperasi dan UMKM	200		160		40		40		100		200		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			371.360.000		285.828.425		-		-				285.828.425		77
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			371.360.000		285.828.425		-		-				285.828.425		77
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	400	371.360.000	135	285.828.425	0	-	0	-			135	285.828.425	34	77
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			839.936.000		652.434.000		683.958.407		671.897.590				1.324.331.590		158
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			839.936.000		652.434.000		683.958.407		671.897.590				1.324.331.590		158
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Laporan Monev UMKM Binaan	372	839.936.000	204	652.434.000	40	683.958.407	40	671.897.590	-	98	244	1.324.331.590	66	158
	Jumlah UKM yang mendapatkan Pelatihan Manajerial Usaha Mikro	120		40		0		0		-		40		33	
	Jumlah Usaha Mikro Kecil yang menerima Bantuan Peralatan/ Perlengkapan Usaha	300		225		5		5		-		230		77	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			69.261.731.301		55.945.224.487		7.154.367.106		6.597.354.410				62.542.578.897		851
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			71.145.000		18.775.000		13.860.000		13.860.000				32.635.000		46

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2017-2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d TW IV 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			71.145.000		18.775.000		13.860.000		13.860.000				32.635.000		46
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Toko Modern yang terpantau perizinan	104	71.145.000	72	18.775.000	75	13.860.000	75	13.860.000	100	100	147	32.635.000	141	46
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			65.926.663.800		54.065.295.637		6.141.694.201		6.062.421.968				60.127.717.605		310
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			51.677.175.800		41.611.566.223		3.290.212.401		3.283.944.014				44.895.510.237		189
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun / direvitalisasi	18	50.499.175.800	19	40.500.726.225	6	3.188.163.654	6	3.185.286.350	100	100	25	43.686.012.575	139	87
	Jumlah sarana dan prasaran pasar yang terpelihara	12		5		10		10		100		15		125	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dan Jenis Pengadaan Sarana prasarana pasar rakyat	330	1.178.000.000	214	1.110.839.998	15	102.048.747	15	98.657.664	100	97	229	1.209.497.662	69	103
	Jumlah Profil Pasar Rakyat / Data pedagang Pasar	4500		1.507		7		7		100		1514		34	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			14.249.488.000		12.453.729.414		2.851.481.800		2.778.477.954				15.232.207.368		121
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah petugas kebersihan dan ketertiban serta petugas pungut retribusi pasar yang dibayarkan Honorariumnya	528	14.071.488.000	440	12.453.729.414	89	2.819.306.800	89	2.755.627.954	100	98	529	15.209.357.368	100	108
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Asosiasi Pedagang yang terbentuk	5	178.000.000	-	-	5	32.175.000	4	22.850.000	80	71	4	22.850.000	80	13
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK			551.185.000		491.791.750		310.358.955		289.781.941				781.573.691		142

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2017-2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d TW IV 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%
DAN BARANG PENTING															
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			442.030.000		442.668.550		294.688.955		276.866.941				719.535.491		163
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah terbitan Perkembangan Harga Komoditas yang di publikasi	624	173.000.000	502	116.605.000	86	34.400.000	86	34.400.000	100	100	588	151.005.000	94	87
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Sembako yang terdistribusikan ke masyarakat berpenghasilan rendah	7200	269.030.000	7.800	326.063.550	2600	260.288.955	2600	242.466.941	100	93	10400	568.530.491	144	211
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			109.155.000		49.123.200		15.670.000		12.915.000				62.038.200		57
Pengawasan Penyaluran dan Pergunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah produk/komoditas barang penting yang diawasi	6	109.155.000	5	49.123.200	1	15.670.000	1	12.915.000	100		6	62.038.200	100	57
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			1.039.660.501		282.428.600		589.703.950		133.572.520				416.001.120		40
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.039.660.501		282.428.600		589.703.950		133.572.520				416.001.120		40
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Promosi yang diikuti	6	851.722.501	3	282.428.600	2	571.105.500	2	119.522.520		-	5	401.951.120	83	47
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Eksportir yang terfasilitasi	10		-		0		0		-		0		-	
	Jumlah Peserta pelatihan calon eksportir	60	187.938.000	-	-	30	18.598.450	30	14.050.000	100	76	30	14.050.000	50	7
PROGRAM STANDARDISASI															

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2017-2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d TW IV 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			285.507.000		302.687.100		98.750.000		97.717.981				400.405.081		257
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			285.507.000		302.687.100		98.750.000		97.717.981				400.405.081		257
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	5700	224.208.000	4.881	258.282.600	1600	77.225.000	16 00	76.192.981	100	99	6481	334.475.581	114	149
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat Metrologi yang diawasi	250	61.299.000	230	44.404.500	120	21.525.000	12 0	21.525.000	100	100	350	65.929.500	140	108
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			1.387.570.000		784.246.400		-		-				784.246.400		57
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			1.387.570.000		784.246.400		-		-				784.246.400		57
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Promosi yang terselenggara	5	1.387.570.000	4	784.246.400	0	-	0	-			4	784.246.400	80	57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.351.780.500		2.339.239.320		1.392.403.980		1.385.436.910				3.724.676.230		357
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			3.151.780.500		2.204.615.320		1.343.404.280		1.338.050.910				3.542.666.230		177
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			3.151.780.500		2.204.615.320		1.343.404.280		1.338.050.910				3.542.666.230		177
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota	1	300.000.000	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikasi Halal	81	552.903.000	23	169.262.800	0	-	0	-	-	-	23	169.262.800	28	31
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	24	2.298.877.500	23	2.035.352.520	8	1.343.404.280	8	1.338.050.910	100	100	31	3.373.403.430	129	147
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan /	200		90		697		697		-		787		394	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2017-2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW IV 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d TW IV 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%
		Bantuan Bahan Baku													
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			30.000.000		12.554.000		14.999.700		13.836.000				26.390.000		88
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000		12.554.000		14.999.700		13.836.000				26.390.000		88
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang dipantau terkait Pengawasan Perizinan dibidang Industri kewenangan kabupaten	34	30.000.000	17	12.554.000	17	14.999.700	17	13.836.000	100	92	34	26.390.000	100	88
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			170.000.000		122.070.000		34.000.000		33.550.000				155.620.000		92
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			170.000.000		122.070.000		34.000.000		33.550.000				155.620.000		92
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan/ Pemutahiran Data IKM	6	170.000.000	5	122.070.000	1	34.000.000	1	33.550.000	100	99	6	155.620.000	100	92
			126.896.090.658		98.980.239.243		17.537.852.535		16.677.742.424		-		115.657.981.667		